

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Keamanan merupakan bagian yang penting secara global untuk menjaga stabilitas perdamaian dunia dari segala bentuk ancaman keamanan atas keberlangsungan hidup masyarakat global ( Colin mcinnes and kelley lee, 2012). Adapun keamanan secara global yang memiliki keterkaitan terhadap keamanan regional dan keamanan nasional disetiap negara yang dapat mempengaruhi bagaimana keadaan perdamaian dunia, dan pentingnya setiap negara untuk bisa saling berkontribusi dalam menciptakan keamanan secara global.

Tidak hanya secara global saja, namun secara regional juga penting, karena didalam satu regional dapat bisa saling berkerjasama dalam menciptakan kestabilan keamanan yang dimana dapat mempengaruhi aspek hubungan antar negara dalam melakukan kerjasama mulai dari aspek ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Keamanan regional biasanya memiliki lembaga atau komunitas untuk memitigasi adanya bahaya ancaman keamanan secara tradisional maupun non-tradisional, yang dimana sewaktu-waktu dapat saja terjadi. Baik secara global, regional, dan adapaun setiap negara di dunia memiliki tanggung jawab atas jaminan keamanan setiap warga negaranya, yang dimana hal tersebut merupakan hak asasi manusia yang harus dilindungi oleh negara (Mantong, 2020).

Bahwasanya perlu diketahui setelah Perang Dingin konsep keamanan mengalami perkembangan berupa perluasan makna yang tidak hanya terfokus pada aspek-aspek yang bersifat militeristik atau fisik saja, tetapi konsep keamanan telah mengalami perkembangan pada berbagai aspek non-militer (Youde, 2015). Seperti adanya konsep keamanan non-tradisional yang menjadi tantangan bagi kelangsungan hidup atas kesejahteraan masyarakat global. Adapun fenomena mengenai keamanan yang muncul dari aspek non-militer, seperti perubahan iklim, kelangkaan sumber daya, penyakit menular,

bencana alam, migrasi tidak teratur, kekurangan pangan, penyelundupan manusia, perdagangan narkoba dan kejahatan transnasional ( Colin mcinnes and kelley lee, 2012).

Sebelum Perang Dingin fokusnya adalah ke negara, namun setelah Perang Dingin beralih fokusnya kepada keamanan manusia. Hal tersebut disebabkan oleh menderitanya manusia akibat dampak setelah Perang Dingin, dan bahwasanya manusia sebagai fokus utama yang harus dilindungi (Smythe, 2013).

Adapun salah satu contoh dari pentingnya keamanan secara global, regional, dan negara adalah terjadinya suatu fenomena tentang keamanan kesehatan yang terjadi pada abad ke-21 ini, yang dimana fenomena tersebut sangat mengancam keamanan kesehatan manusia. Keamanan kesehatan menjelaskan tentang jaminan kesehatan manusia dari suatu masalah kesehatan yang dapat mempengaruhi hidup manusia. Keamanan kesehatan adalah komponen yang penting bagi manusia dalam menunjang keberlangsungan hidupnya untuk mendapatkan kesejahteraan atas rasa aman. Bahwanya kesehatan merupakan kebutuhan setiap manusia dalam memperoleh kualitas dan fasilitas yang baik pada sektor kesehatan global ( Colin mcinnes and kelley lee, 2012). Fenomena keamanan kesehatan tersebut adalah suatu pandemi yang tergolong sangat berbahaya terhadap kestabilan keamanan secara global, regional, dan negara.

Pada akhir tahun 2019 sampai 2021 dan bahkan sampai waktu yang tidak menentu, dunia sedang menghadapi masalah keamanan kesehatan yang terjadi diakibatkan oleh *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) yang merupakan penyakit yang disebabkan virus *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-CoV-2) yang dapat menular, yang dimana penularannya menyerang imunitas tubuh, yang dimana virus tersebut menjadi suatu pandemi secara global (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020).

Perlu diketahui bahwa indikasi awal terinfeksi Covid-19 dengan adanya gejala pasien yang akan merasakan gangguan sesak napas, dan demam. Terkonfirmasi kasus Covid-19 berawal dari negara China yang

memberikan informasi bahwa pada kawasan Wuhan di China terdapat pasien Covid-19, dan dikonfirmasi pada 31 Desember 2020. *World Health Organization* (WHO) pada 30 Januari 2020 mengidentifikasi bahwa Covid-19 sebagai ancaman darurat kesehatan masyarakat (*World Health Organization*, 2021). Dapat dikatakan bahwa Covid-19 merupakan hal yang berbahaya bagi keberlangsungan hidup manusia. Keamanan kesehatan menjadi hal yang penting bagi setiap negara yang dimana menjadi isu penting dan fokus utama atas kesehatan bagi manusia. Keamanan kesehatan sebagai salah satu tanggung jawab negara untuk menjamin keselamatan hidup manusia agar terbebas dari virus atau ancaman kesehatan yang dapat merugikan nyawa manusia.

Semakin berkembangnya globalisasi banyak ditemukan penyakit atau virus baru yang dapat mengganggu kesehatan manusia. Hal tersebut membuat setiap negara berusaha untuk menanggulangi maupun pencegahan ancaman keamanan kesehatan. Tidak dapat dipungkiri penyebaran Covid-19 sangat cepat pada awal pandemi, dikarenakan adanya mobilitas orang yang melakukan perjalanan melintasi batas negara atau melakukan perjalanan ke luar negeri. Sehingga, pandemi Covid-19 berdampak kepada seluruh negara yang ada di dunia (Wicaksono, 2020).

Fenomena pandemi Covid-19 salah satu negara yang terdampak adalah Indonesia, dan menjadi negara yang harus menghadapi pandemi Covid-19. Bahwasanya pada tanggal 2 Maret 2020 Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengkonfirmasi terdapat laporan pertama pasien yang terkena Covid-19 (CNN Indonesia, 2020). Dapat dikatakan dengan masuknya Covid-19 ke Indonesia, bahwasanya perkembangan Covid-19 semakin menyebar di berbagai wilayah Indonesia dan meningkatnya orang yang terinfeksi Covid-19 setiap harinya sekitar 5000 orang dengan rentang dari tanggal 2 Maret 2020 sampai 12 Maret 2020 (Badan Pusat Statistik, 2022). Sehingga, pada tanggal 13 Maret 2020 Indonesia membentuk Gugus Tugas percepatan dan penanganan Covid-19 sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 7 tahun 2020, yang berfokus untuk bersinergi menangani dampak-dampak yang membahayakan akibat Covid-19, dan menetapkan pada tanggal 31 Maret 2020

bahwa Covid-19 merupakan kedaruratan kesehatan masyarakat melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 (Hadi, 2021).

Sebagai negara yang terkena dampak Covid-19, adapun dampak yang dirasakan oleh Indonesia dari beberapa sektor yaitu, ekonomi, sosial, dan politik. Adapun sektor ekonomi dan sosial yang sangat krusial terdampak Covid-19, kedua sektor tersebut memiliki keterkaitan dalam kehidupan sehari-hari bagi setiap individu dalam melakukan interaksi sosial maupun memenuhi kebutuhan hidupnya (Muhamad, 2021).

Tidak dapat dipungkiri bahwa pemerintah harus segera mengambil tindakan kebijakan yang melandaskan aturan mengenai tentang mobilitas sosial masyarakat Indonesia. Wujud nyata dari dampak sosial adalah ketika setiap individu memiliki keterbatasan untuk melakukan interaksi dengan individu lainnya, tindakan tersebut bertujuan agar mencegah terjadinya penularan Covid-19. Sesuai dengan kebijakan pemerintah melalui Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020).

Hal tersebut memiliki keterkaitan terhadap kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Dampak sektor ekonomi dapat dilihat dari penutupan sementara kegiatan yang berhubungan dengan perekonomian seperti perkantoran, sektor pariwisata, sektor perdagangan dan lain sebagainya, dengan adanya kebijakan tersebut memperlambat pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dari tahun 2019 ke 2020 terlihat jelas perbedaan angka yang cukup signifikan dari 5,02 persen ke 2,07 persen, dengan begitu menandakan perekonomian di tengah pandemi Covid-19 sangat terdampak bagi pertumbuhan perekonomian negara (Badan Pusat Statistik, 2021).

Berkaitan dengan dampak dari sektor ekonomi dan sosial, dapat dilihat juga dampak politik yang terjadi pada saat pandemi Covid-19 di Indonesia, bahwasanya dengan ketidakpastian pandemi Covid-19 berdampak kepada kebijakan pemerintah dalam membuat peraturan yang berkaitan dengan regulasi penanganan Covid-19 dan kebijakan tersebut dapat berubah. Hal tersebut dikarenakan pemerintah akan menyesuaikan dengan keadaan pandemi

Covid-19 di Indonesia bagaimana pemerintah harus bersikap bijaksana terhadap kebijakannya (Gindarsah, 2020).

Peran pemerintah Indonesia dalam menanggapi Covid-19 yang telah menjadi suatu pandemi di Indonesia, bahwasanya pemerintah tidak tinggal diam untuk memberikan penanganan yang terbaik untuk mengurangi penyebaran Covid-19 yang signifikan menyebar keseluruh wilayah di Indonesia. Tidak mudah bagi setiap negara untuk dengan cepat dan instant dalam pencegahan virus ini, kehadirannya menjadi tantangan bagi Indonesia dalam menghadapi pandemi Covid-19 (Wangke, 2021).

Dan Indonesia dalam menangani pandemi Covid-19 secara dini dengan melakukan program 3M dan 3T yang bertujuan untuk pencegahan penularan virus Covid-19 di lingkungan masyarakat, dengan berlandaskan protokol kesehatan yang dianjurkan. Penerapan untuk 3M dalam penanganan kesehatan dengan menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Selanjutnya, program pemerintah melalui 3T yaitu *testing*, *tracing*, dan *treatment* yang bertujuan untuk mendeteksi setiap individu yang telah terinfeksi virus Covid-19 setelah melakukan tes pemeriksaan Covid-19 (covid19.go.id, 2020).

Dalam penelitian ini pemerintah Indonesia melakukan upaya secara jangka panjang untuk pencegahan penyebaran Covid-19, dengan cara melakukan vaksinasi Covid-19. Adapun alasan Indonesia harus melakukan vaksinasi Covid-19 adalah karena vaksin menjadi salah satu upaya secara global dalam keamanan kesehatan untuk melindungi masyarakat disetiap negara (Muhamad, 2021).

Vaksinasi sebagai upaya pemerintah untuk menangani penyebaran Covid-19 secara meluas, dengan dilaksanakannya vaksinasi yang diberikan kepada setiap individu dapat membentuk kekebalan atau proteksi tubuh dari bahaya Covid-19. Yang dimana jika suatu kawasan telah memnuhi target vaksinasi, maka dapat dikatakan kawasan tersebut telah membentuk *herd immunity* di lingkungan masyarakat. Indonesia menargetkan sekitar 70% dari penduduk Indonesia telah melakukan vaksinasi (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020).

Dalam memenuhi atau memperoleh vaksin Covid-19 dan pelaksanaan vaksinansi Covid-19 telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020. Hal tersebut menjadi implementasi dari kebijakan pemerintah yang mengedepankan keselamatan masyarakatnya untuk memenuhi keamanan kesehatan. Setiap negara akan berusaha untuk menangani masalah pandemi Covid-19, karena pandemi Covid-19 memberikan dampak terhadap keberlangsungan hidup manusia, dan juga terjadinya dinamika ketidakstabilan dalam segala aspek kehidupan yang saling berkaitan. Dan vaksinansi telah dilakukan pertama kali oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada tanggal 13 Januari 2021 dengan vaksin Sinovac hasil kerjasama dengan China atau dapat dikatakan diluar kerjasama dari Covax Facility (Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2021).

Adanya rasa senasib yang dirasakan oleh setiap negara, yang akhirnya saling menjalin interkasi sosial untuk bekerjasama menangani pandemi Covid-19, dan salah satunya melakukan diplomasi kesehatan global untuk memperoleh vaksin Covid-19 dari negara-negara yang memproduksi vaksin Covid-19 (Zhaohui Su, 2021).

Sejak awal terjadinya peningkatan jumlah kasus pasien yang terinfeksi Covid-19, membuat pemerintah untuk segera mengambil tindakan dalam pencegahan Covid-19 secara efektif dan tepat. Bahwasanya Indonesia merupakan negara yang tidak memproduksi vaksin Covid-19, maka dari itu Indonesia berupaya untuk memperoleh vaksin Covid-19 dari negara-negara yang memproduksi vaksin Covid-19 (Wangke, 2021).

Pemerintah menggunakan cara diplomasi kesehatan global yang ditujukan untuk mendapatkan akses vaksin Covid-19 untuk penduduk di Indonesia, dengan merujuk terhadap ketetapan aturan *World Health Organization* (WHO). Pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab terhadap keselamatan masyarakatnya, dengan begitu melalui diplomasi menjadi salah satu akses Indonesia untuk mendapatkan vaksin Covid-19 (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2021).

Pada tanggal 19 Agustus tahun 2020 sampai 21 Agustus tahun 2020, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri BUMN Erick Tohir menjadi

perwakilan Indonesia untuk melakukan kunjungan ke negara China dan Uni Emirat Arab yang ditujukan membahas komitmen terhadap kesiapan dan tersedianya vaksin Covid-19. Pertemuan Indonesia dengan China dan Uni Emirat Arab sebagai komunikasi dari diplomasi kesehatan global melalui jalur bilateral. Dapat dikatakan pertemuan ini terjadi atau terbilang dilaksanakan pada awal pandemi Covid-19 di Indonesia (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2020).

Pertemuan Indonesia dengan China memperkuat hubungan diplomatik dari kedua negara terhadap beberapa kerjasama yang telah terjalin. Adapun komitmen untuk memperoleh vaksin Covid-19 dari hubungan bilateral ini, yang dimana Indonesia bersama perusahaan farmasi Bio Farma, dan China bersama perusahaan farmasi Sinovac Biotech Ltd., memiliki kesepakatan dalam memperoleh vaksin Covid-19 dari China yang dikirim untuk Indonesia. Kesepakatan yang telah disetujui atau ditandatangani oleh kedua negara ditujukan untuk vaksin Covid-19 sekitar 40 juta dosis, yang pada rencananya akan dikirimkan ke Indonesia mulai bulan November tahun 2020. Pertemuan ini juga sebagai bentuk komitmen dari kedua negara dalam berupaya menghadapi pandemi Covid-19 dan menjaga stabilitas keamanan di kawasan Asia (Raditio, 2021).

Dalam pertemuan Indonesia dengan Uni Emirat Arab untuk memperoleh vaksin Covid-19 dengan mencapai kesepakatan bahwa Indonesia akan memperoleh vaksin Covid-19 sebanyak 10 juta dosis dari Uni Emirat Arab. Pertemuan ini ditujukan juga mengetahui progress dari uji klinis vaksin Covid-19 yang sedang dilakukan (Badan POM Rpublik Indonesia, 2020). Dalam komitmen dalam memperoleh sampai dengan uji klinis, dan dikirimnya vaksin Covid-19, komitmen Indonesia dengan Uni Emirat Arab dipertegas melalui pendandatangan kesepakatan bersama oleh perusahaan farmasi Bio Farma dan Kimia Farma dari Indonesia, dan G42 dari Uni Emirat Arab (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2020).

Jadi, dapat dikatakan pada awal masa pandemi Covid-19 di Indonesia, bahwa pemerintah telah melakukan upaya untuk memperoleh vaksin Covid-19 yang ditujukan untuk vaksinasi Covid-19. Melalui hubungan bilateral

Indonesia-China, Indonesia-Uni Emirat Arab yang menghasilkan kesepakatan dalam memperoleh vaksin Covid-19. Bahwa pada penelitian ini diplomasi kesehatan global yang dilakukan Indonesia melalui multilateral. Namun, yang dilakukan pemerintah Indonesia secara bilateral dan multilateral saling melengkapi dan bersinergi dalam memperoleh vaksin Covid-19.

Adapun peran pemerintah dalam pencegahan penyebaran Covid-19 dalam memperoleh vaksin Covid-19 melalui diplomasi kesehatan global yang teraliansi pada Covax Facility. Covax Facility adalah pilar vaksin Covid-19 atau disebut ACT (Accelerator Access to COVID-19 Tools) sebagai platform untuk negara-negara didunia dalam memperoleh akses vaksin Covid-19, dan bernegosiasi ke negara ataupun *private sector* yang memproduksi vaksin Covid-19 mengenai harga vaksin. Strategi dari Covax Facility memberikan kemudahan untuk negara-negara yang tergolong kedalam negara yang memiliki *low income* maupun *lower middle income*, dengan begitu melalui fasilitas tersebut akan menciptakan kesetaraan vaksin Covid-19 (Dr Seth Berkley, Gavi The Vaccine Alliance, 2020 ).

Dan GAVI merupakan bagian dari forum diplomasi kesehatan global yang dapat membantu pencegahan pandemi Covid-19 dalam menyediakan vaksin Covid-19 melalui platform Covax Facility, sehingga semua aktor dapat berkontribusi menyetarakan dalam mendapatkan akses vaksin Covid-19 untuk seluruh negara yang di dunia (Thomas E. Novotny, 2013).

Indonesia melalui surat resmi *Expression of Interest* pada tanggal 16 Oktober 2020 melalui *press briefing* secara daring oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, bahwa Indonesia bergabung kedalam Covax Facility (Media Indonesia, 2020). Dan kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dengan Covax Facility merupakan kerjasama multilateral, yang dimana terdapat negara-negara dan aktor lain yang ikut terlibat didalam Covax Facility. Vaksin yang akan didapat Indonesia dari Covax Facility 20 persen dari jumlah populasi yang ada di Indonesia, dan didapatkan dengan bebas biaya (CNN Indonesia, 2020).

Dengan bergabung kedalam Covax Facility, Indonesia mendapatkan keuntungan dalam pengeluaran biaya anggaran untuk vaksin Covid-19. Dan

pada tanggal 8 Maret 2021 vaksin tahap pertama yang diberikan Covax Facility sampai ke Indonesia dengan jenis AstraZeneca sebanyak 1,1 juta dosis (Tim Komunikasi Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, 2021).

Namun, untuk mencapai tujuan Indonesia dalam memenuhi kebutuhan vaksin Covid-19, adanya hal yang menjadi tantangan Indonesia untuk menghadapi ketidakpastian dari dinamika perkembangan pandemi Covid-19 secara global yang berasal dari negara-negara yang memproduksi vaksin Covid-19. Maka dari itu, sebagaimana yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi melalui siaran pers-nya, bahwa pemerintah Indonesia terus mengupayakan memenuhi kebutuhan vaksin Covid-19 yang akan membantu pemutusan penyebaran Covid-19 yang ada di Indonesia melalui peran pemerintah Indonesia dalam diplomasi kesehatan global. Bahwasanya pemerintah sangat peduli kepada masyarakat Indonesia atas kehidupan dan keselamatan jiwa yang sangat penting bagi negara untuk melindunginya. Dan seluruh instrument pendukung negara dapat dikatakan menjadi garda terdepan bagi negara dalam penanganan Covid-19, yang dimana kepentingan nasional menjadi dasar dalam menjalani kebijakan nasional dan kebijakan luar negeri di masa pandemi ini (CNBC Indonesia, 2021).

Untuk *literature review* yang pertama penulis merujuk kepada penelitian Zhaohui Su (2021) melalui penelitiannya yang berjudul ***COVID-19 Vaccine Donations-Vaccine Empathy or Vaccine Diplomacy?***. Yang dimana dalam penelitian ini menggunakan metode *narrative review* dengan cara melakukan riset data pada referensi sebuah artikel dalam menganalisis isu yang akan dibahas, dan menggambarkan bagaimana penulis dapat mengidentifikasi pengaruh dari diplomasi terhadap hubungan kasus Covid-19 dan ketersediaan vaksin. Pada penelitian ini memiliki subjek terhadap diplomasi vaksin dan rasa kemanusiaan akibat adanya pandemi Covid-19 yang dialami seluruh negara atau secara global, dan untuk menghadapi pandemi Covid-19 menurut peneliti memerlukan ketersediaan vaksin sebagai penunjang pencegahan penyebaran Covid-19. Untuk analisis pada penelitian tersebut menjelaskan tentang suatu negara memiliki rasa tanggung jawab kepada masyarakatnya

atas perlindungan kesehatan yang dilatarbelakangi oleh terjadinya pandemi Covid-19 untuk memenuhi kebutuhan vaksin. Adapun cara yang digunakan oleh negara dengan melakukan upaya diplomasi untuk menjalin hubungan komunikasi yang dapat memberikan keuntungan satu sama lain. Dengan adanya diplomasi dapat membantu memenuhi ketersediaan vaksin sebagai solusi yang akan bersifat berkelanjutan dalam memperoleh vaksin dengan cara beekrjasama, dan hal tersebut dapat memperkuat hubungan antar negara maupun aktor lain yang terlibat didalam diplomasi. Selain diplomasi vaksin, terdapat empati vaksin yang menjadi bagian dari diplomasi vaksin, dan empati vaksin mengarah terhadap kesetaraan vaksin untuk seluruh masyarakat secara global. Dengan begitu terdapat solidaritas sesama negara, yang dimana dapat digambarkan sebagai sesama makhluk sosial untuk saling menolong atau menjadi bentuk dari rasa kemanusiaan terhadap pandemi Covid-19.

*Literature review* kedua berasal dari penelitian yang berjudul ***Health Diplomacy in Pandemical Times***, ditulis oleh Tanisha M. Faza (2020) dengan menghasilkan argumen melalui rujukan *literature* untuk menganalisis pembahasannya, dan terdapat variable yang menjadi tolak ukur penulis terhadap cara pemerintah disuatu negara dalam menangani pandemi Covid-19, dengan melihat kelembagaan dari pemerintahan negara tersebut. Penulis memiliki argumen tentang diplomasi kesehatan global yang berada ditengah-tengah adanya hubungan internasional. Dengan terjadinya pandemi Covid-19 menjadikan suatu negara memfokuskan bidang kesehatan yang menjadi topik utama, yang dimana diselaraskan dengan kebijakan luar negeri. Diplomasi kesehatan global menjadi implementasi negara dalam hubungan internasional. Dalam diplomasi kesehatan global pada pandemi Covid-19 dapat terlihat peranan dari kebijakan negara yang berkontribusi untuk melakukan kerjasama antar negara maupun aktor secara multilateral, bilateral, dan lainnya. Sebuah kerjasama yang dilakukan akan menimbulkan potensi keunggulan dari hubungan internasional maupun hubungan diplomatik yang efektif untuk membangun kepercayaan yang ada didalam diplomasi kesehatan. Karena tujuan diplomasi kesehatan global perlunya strategi yang telah disusun dengan baik, yang dimana terdapat kepentingan nasional. Wujud dari proses diplomasi

kesehatan global yang baik adalah dengan dilihatnya fasilitas barang yang baik dan dapat digunakan oleh masyarakat. Menurut penulis dalam pembahasan ini melihat adanya rasa kemanusiaan yang mendorong terlaksananya kolektif bersama untuk kesehatan masyarakat atas pandemi Covid-19. Namun, disisi lain terdapat tantangan dalam kerjasama untuk menangani pandemi Covid-19, yang dimana terdapat kebijakan dari masing-masing negara yang berbeda dan menimbulkan proses yang cukup lama untuk melakukan pengiriman fasilitas kesehatan, misalnya vaksin Covid-19. Komitmen yang terjalin harus benar-benar ajeg untuk keberlangsungan jalannya diplomasi kesehatan global dalam menangani penyebaran Covid-19. Dan dalam diplomasi kesehatan global untuk pandemi Covid-19 dan memperoleh vaksin, penulis beranggapan bahwa untuk menyingkirkan kepentingan politik dari situasi atas fenomena pandemi Covid-19, karena disaat sekarang lebih penting rasa kemanusiaan untuk segera melindungi keberlangsungan hidup manusia dari bahaya pandemic Covid-19.

Pada *Literature review* ketiga menggunakan penelitian yang berjudul ***Pandemic Experiences and the Possibility of Global Health Diplomacy***, penelitian ditulis oleh Sharif Mustajiba dan Fahmida Alam (2021). Pada penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif, yang dimana bertujuan untuk mengidentifikasi isu kesehatan global tentang Covid-19, dengan memberikan kesimpulan terdapat keterkaitan diplomasi kesehatan global. Menurut peneliti tentang situasi Covid-19 yang dinamis, membuat suatu negara tidak bisa menghadapinya tanpa bantuan dari negara lain. Dan dalam situasi yang tidak menentu perlu adanya bantuan negosiasi yang memiliki solusi dengan didukung instrumen politik dan ekonomi. Untuk menangani pandemi Covid-19 tidak hanya aktor negara saja yang terlibat, namun terdapat aktor non-negara yang juga ikut andil untuk menangani pandemi Covid-19. Dapat dikatakan bahwa adanya kebijakan global yang terbentuk dari koordinasi aktor-aktor tersebut. misalnya salah satu contohnya adalah ketika aktor non-negara seperti *The Bill and Melinda Gates Foundation* juga berpartisipasi untuk memproduksi vaksin Covid-19, atau dapat dikatakan aktor tersebut memiliki rasa kemanusiaan atas kepeduliannya terhadap

kondisi pandemi Covid-19 yang dapat membahayakan kehidupan di dunia. Hal tersebut implementasi dari kesadaran untuk bisa setidaknya mengurangi dampak dari pandemi Covid-19 yang telah merugikan dari berbagai aspek kehidupan, seperti ekonomi, sosial, maupun politik. Melalui diplomasi kesehatan global menjadi agenda tujuan kebijakan global dalam melawan pandemi Covid-19. Namun, disisi lain dari sebuah diplomasi kesehatan global terdapat pelajaran bagi suatu pemerintahan untuk peduli terhadap fenomena yang bisa saja terjadi sewaktu-waktu seperti pandemi Covid-19, maka dari itu diperlukannya kesiapan siagaan dari pemerintah untuk menangani fenomena seperti pandemi Covid-19, agar tidak terjadi keterlambatan dalam menanganinya. Peneliti melihat dengan adanya pandemi Covid-19, bahwasanya dunia secara global masih memiliki kekurangan atas kesiapan dari strategi kebijakan global untuk menghadapi pandemi Covid-19. Dan melalui diplomasi kesehatan global memberikan peluang bagi aktor negara maupun non-negara meningkatkan signifikansi pentingnya diplomasi kesehatan global yang ditujukan untuk lebih efektif dan memiliki integrasi.

Selanjutnya terdapat penelitian yang dilakukan oleh (Sanaz Taghizade 2021) dengan judul *COVID-19 Pandemic as an Excellent Opportunity for Global Health Diplomacy*, penelitian ini merujuk pada penggunaan data dari hasil riset yang dilakukan oleh penulis. Pandemi Covid-19 memberikan tantangan terhadap pengelolaan kesehatan global, yang dimana fenomena tersebut memberikan dampak kepada hubungan aspek kehidupan yang saling berkaitan. Tetapi dengan adanya pandemi Covid-19 dapat dilihat bagaimana jalannya proses suatu kerjasama di tingkat bilateral, regional, dan multilateral. Yang dimana setelah pandemi Covid-19, penulis berargumen akan terjadinya persaingan antar negara yang diakibatkan oleh perekonomian dan politik, bahwasanya aspek tersebut memiliki keterkaitan dalam pembangunan nasional. Namun, terdapat peluang untuk melakukan kerjasama yang bertujuan untuk keluar dari krisis dampak akibat pandemi Covid-19. Hal tersebut digunakan untuk membangun hubungan antar aktor yang berada pada arena diplomasi kesehatan global. Dengan adanya diplomasi kesehatan global bermanfaat untuk melakukan negosiasi untuk kebijakan yang lebih selaras

dengan fenomena yang terjadi dan memperkuat kerjasama internasional untuk merealisasikan vaksin Covid-19. Diplomasi kesehatan global ditunjukkan untuk mengeratkan hubungan kerjasama internasional dalam melakukan koordinasi terhadap pandemi Covid-19 dan memberikan kesetaraan terhadap distribusi vaksin Covid-19 maupun fasilitas kesehatan lainnya. Dengan adanya Covid-19 memberikan gambaran untuk negara-negara dalam mengimplementasikan kebijakan domestik dan kebijakan luar negerinya, dan yang paling terlihat adalah ketikan kebijakan tersebut bersifat bijaksana tidak egosi untuk mementingkan negara sendiri, namun disisi lain negara juga menolong negara lain yang sedang membutuhkan bantuan. Diplomasi kesehatan global menjadi instrumen untuk membawa kepentingan nasional ke tingkat global untuk mendapatkan hasil yang telah diharapkan. Dapat dikatakan melalui penelitian ini, diplomasi kesehatan global memiliki peran penting disaat pandemi Covid-19 yang sedang berdampak secara global. Dan melalui diplomasi kesehatan global dapat memberikan hal yang baik bagi Kementerian terkait yang menangani pandemi Covid-19 untuk bisa mengevaluasi apakah kebijakan yang telah dibuat sudah baik atau perlu adanya peningkatan dan revisi, karena peran pemerintah sangat berpengaruh terhadap keadilan bagi masyarakat, dan apalagi tentang kesetaraan dalam memperoleh vaksin Covid-19.

Selanjutnya terdapat judul *Prioritizing 'equity' in COVID-19 vaccine distribution through Global Health Diplomacy* oleh Bawa Singh dan Vijay Khumar Chattu (2021). Penulis berargumen bahwa pandemi Covid-19 menjadi salah satu situasi tentang isu kesehatan global yang paling terburuk sepanjang peristiwa isu kesehatan lainnya. Adanya dampak yang membuat negara maju maupun berkembang kurang siap untuk menghadapi pandemi Covid-19, hal tersebut dapat dilihat dari pemenuhan vaksin Covid-19 dan fasilitas kesehatan yang baik untuk masyarakatnya. Melalui penelitian ini dapat dikatakan bahawa penulis merujuk terhadap peran dari diplomasi kesehatan global yang dapat membantu mengedepankan kesetaraan dalam memperoleh vaksin Covid-19 yang berada dalam arena kesehatan global untuk menghadapi Covid-19. Dan melalui diplomasi kesehatan global terdapat kekuatan dari pemangku kepentingan yang dapat memperjuangkan kesetaraan

dalam memperoleh vaksin Covid-19 dalam sebuah kerjasama untuk membangun solidaritas bersama. Perlu adanya tata kelola yang baik dari diplomasi kesehatan global dengan disertai komitmen global untuk membangun kemitraan antar aktor yang terlibat dalam diplomasi kesehatan global. Serta, hal ini menjadi salah satu implementasi dari pembangunan internasional SDGs dalam melakukan pencapaian untuk seluruh negara mendapatkan kesetaraan kesehatan yang baik, karena hal tersebut menjadi tujuan bersama. Maka dari itu, diplomasi kesehatan global juga bagian dari kebijakan luar negeri bagi suatu negara untuk melakukan strategi dalam komitmen terhadap penanganan Covid-19.

## 1.2 Rumusan Masalah

Dilihat dari latar belakang masalah pada penelitian ini bahwa telah terjadi fenomena pandemi Covid-19 secara global yang dapat mengancam keamanan kesehatan manusia di dunia, karena penyebaran virusnya yang dapat menular dengan cepat. Covid-19 menjadi ancaman keamanan kesehatan yang termasuk *transboundary*. Indonesia menjadi salah satu negara yang harus menghadapi pandemi Covid-19, karena terdapat dampak-dampak bahaya yang saling berkaitan dan mempengaruhi stabilitas negara. Dalam melakukan upaya untuk pencegahan agar dampak-dampak yang berbahaya, Indonesia memiliki kebijakan untuk pencegahan dini (3M dan 3T) dan jangka panjang (vaksinasi). Adapun kenyataan dalam pencegahan jangka panjang untuk melakukan vaksinasi, bahwasanya Indonesia harus memperoleh vaksin Covid-19 dari aktor negara maupun non-negara yang memproduksi vaksin Covid-19. Cara yang dilakukan Indonesia dengan cara melalui diplomasi kesehatan global untuk memperoleh vaksin Covid-19.

Adapun pertanyaan yang menjadi rumusan masalah dalam tulisan ini adalah bagaimana diplomasi Indonesia untuk menciptakan keamanan kesehatan di Indonesia Melalui Covax Facility (2020-2021)?

## 1.3 Tujuan Penelitian

### 1.3.1 Tujuan Praktis

Untuk melihat upaya diplomasi kesehatan global pemerintah Indonesia dalam berkomunikasi dan bersinergi dengan aktor lain untuk menciptakan keamanan kesehatan di level nasional, regional, dan global yang sebagai bagian dari cara negara untuk mendapatkan vaksin Covid-19.

### 1.3.2 Tujuan Teoritis

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan operasional konsep diplomasi kesehatan global untuk menciptakan keamanan kesehatan. Karena secara teoritik isu kesehatan global di hubungan internasional sangat baru, karena dari segi diplomasi kesehatan global dan keamanan kesehatan begitu penting untuk menjaga stabilitas negara.

## 1.4 Manfaat Penelitian

### 1.4.1 Manfaat Praktis

Diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pemerintah Indonesia bahwa pentingnya kesiapan siaga dalam menangani fenomena kesehatan seperti pandemi Covid-19 sebagai ancaman keamanan kesehatan global, sebagaimana pandemi dapat saja terjadi sewaktu-waktu atau diluar dugaan.

### 1.4.2 Manfaat Teoritis

Untuk memberikan kontribusi kepada akademisi hubungan internasional melalui konsep diplomasi kesehatan global dan keamanan kesehatan terhadap fenomena pandemi Covid-19. Permodelan kebijakan implikasi diplomasi kesehatan global untuk menciptakan keamanan kesehatan.

## 1.5 Sistematika Penulisan

### BAB 1

Dalam BAB 1 yang pertama terdapat latar belakang masalah yang mencakup gambaran penelitian yang dilakukan oleh penulis. Kedua, rumusan masalah yang dimana terdapat masalah yang menjadi dasar penulis untuk melakukan penelitian dalam memecahkan masalah tersebut. Keempat, tujuan

penelitian sebagai upaya dan maksud penulis dalam melakukan temuan yang ada didalam penelitian. Kelima, manfaat penelitian ditunjukkan agar penelitian yang dilakukan penulis dapat berguna untuk pembaca dalam ruang lingkup akademisi maupun masyarakat. Dan yang terakhir sistematika penulisan sebagai deskripsi isi dari pembahasan pada tugas akhir skripsi.

## BAB 2

Membahas mengenai konsep dan teori untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang dilakukan penulis dan disesuaikan dengan isi dari pembahasan judul pada penelitian ini. Dan terdapat kerangka pemikiran sebagai alur dalam melakukan penelitian untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah.

## BAB 3

Metode penelitian sebagai proses sistematis dalam rangkain penelitian untuk menyusun pembahasan yang diteliti tersusun dengan jelas dan rapih. Dalam metode penelitian terdapat beberapa poin yang dapat membantu dalam penyusunan skripsi ini yaitu yang pertama adanya objek penelitian untuk meburaiakan objek yang diteliti pada penelitian ini. Kedua, jenis penelitian kualitatif yang digunakan untuk mendukung fakta dan data. Ketiga, teknik pengumpulan data dalam penelitian dilihat bagaimana cara dan proses pengumpulannya. Keempat, sumber data untuk mengetahui data yang dipeoleh berasal dari sumber data dari mana. Kelima, teknik analisa data yang ditunjukkan dalam menguraikan pendekatan kualitatif dalam metode analisa. Dan yang terakhir, tabel rencana waktu sebagai jadwal dalam melakukan penelitian agar sesuai dengan rencana dan batas dalam melakukan penelitian pada waktu yang sudah ditentuka.

## BAB 4

Pembahasan dalam penelitian merupakan penjelasan dari gambaran secara umum mengenai topik pembahasan yang diangkat dalam penelitian. Peneliti membahas tentang bagaimana negara Indonesia dapat menciptakan keamanan

kesehatan yang begitu penting bagi setiap individu. Keamanan kesehatan menjadi fokus utama pada saat ini, karena dunia secara global sedang menghadapi tantangan pandemi Covid-19 yang menjadi ancaman keamanan kesehatan manusia. Covid-19 merupakan penyakit menular yang sangat berbahaya dan menyerang kekebalan tubuh manusia.

## BAB 5

Analisis penelitian mendeskripsikan hasil analisis data-data yang dilakukan atas dasar teori atau konsep yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah dan memperkuat data-data yang didapat untuk melakukan penelitian. Untuk analisis penelitian membahas mengenai Indonesia yang menjadi salah satu negara yang merasakan implikasi dari pandemi Covid-19, dan Indonesia bukan negara yang memproduksi vaksin Covid-19. Sehingga, Indonesia melakukan diplomasi kesehatan global untuk memperoleh vaksin Covid-19 melalui Covax Facility.

## BAB 6

Kesimpulan dan saran merupakan rangkain terakhir dari penelitian ini yang berisikan argument untuk menjelaskan dengan merangkum isi dan menjawab masalah dalam penelitian ini secara teoritik. Dan saran ditujukan untuk ide atau usulan dari peneliti secara praktis di lapangan dan teoritis untuk dunia akademisi dengan menggunakan perspektif peneliti.